

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan yang besar bagi negara. Pelaksanaan perpajakan diatur oleh pemerintah Indonesia di dalam Undang-Undang untuk mempertahankan penerimaan negara. “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang” tertulis dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar. Penyetoran pajak penghasilan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan kepada negara, sehingga dapat dikatakan bahwa pembayaran pajak penghasilan itu merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Sebagai biaya, pembayaran pajak seringkali diminimalkan oleh manajemen perusahaan dengan melakukan tindakan pajak agresif (Chen, Cheng dan Shevlin, 2010). Tindakan pajak agresif ini dilakukan manajemen perusahaan dengan melihat adanya celah dalam peraturan yang ada, bukan melanggar peraturan.

Tindakan pajak agresif merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan yang dibuat. Tindakan pajak agresif digolongkan menjadi dua meliputi *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan manipulasi penghasilan secara ilegal untuk memperkecil jumlah pajak terutang dari ketentuan perundang-undangan perpajakan yang ada. Begitu pula dengan *tax avoidance* merupakan manipulasi

Penghasilan secara legal untuk memperkecil jumlah pajak terutang. *Tax avoidance* dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Pemanfaatan yang bersifat legal ini berguna untuk untuk mengurangi hutang pajak yang menjadi beban perusahaan. Agresifitas pajak dapat timbul karena ada perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Di sisi lain, perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa pajak sebagai biaya karena dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima oleh perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2007), pajak merupakan faktor pendorong dalam keputusan perusahaan. Oleh karena itu, tindakan manajerial dirancang sedemikian rupa untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresif pajak. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui aktivitas perencanaan pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Keputusan yang diambil perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif tidak hanya didasari manfaat yang diperoleh dari penghematan biaya. Perusahaan juga melihat akibat lain yang mungkin ditimbulkan ketika melakukan tindakan pajak agresif, seperti konflik antara manajemen dengan pemilik perusahaan (Sari dan Martani, 2010). Untuk itu, perusahaan memerlukan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Suatu perusahaan bertujuan untuk memiliki tata kelola perusahaan yang baik, efektif dan efisien. *Corporate governance* telah diatur

penerapan-penerapan yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perusahaan dapat terus berkembang dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti patuh dalam hal pembayaran pajak.

Perusahaan yang telah menerapkan karakteristik *corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit) diharapkan menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena *corporate governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan *stakeholder*. *Corporate governance* dan agresifitas pajak memiliki sebuah hubungan timbal balik, karena perusahaan merupakan wajib pajak sehingga karakteristik *corporate governance* mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain agresifitas pajak tergantung pada dinamika dari *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Beberapa karakteristik *corporate governance* dalam perusahaan akan menentukan penerapan manajemen pajak (Sari dan Martani, 2010).

Karakteristik *corporate governance* yang pertama yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga atau suatu institusi (Tarjo, 2008, dalam Ika Permanasari, 2010). Adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen. Dengan pengawasan yang lebih besar oleh pihak pemilik, akan menghalangi perilaku manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Annisa dan Kurniasih,

2012). Karakteristik *corporate governance* kedua yaitu komisaris independen. Komisaris independen merupakan pihak independen, sehingga tidak memiliki hubungan dengan seluruh pemegang saham, ataupun direksi perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012). Sebagai pihak independen yang tidak memiliki kepentingan terhadap perusahaan, komisaris independen akan menjadi pemantau kinerja manajemen perusahaannya. Pemantauan atas kinerja manajemen juga terkait masalah perpajakan perusahaan. Atas pemantauan tersebut, manajemen cenderung menekan tindakan pajak agresif yang dilakukan.

Komite audit merupakan karakteristik selanjutnya dari *corporate governance*. Komite audit berfungsi sebagai pengawas dalam pembuatan laporan keuangan dan melakukan pengawasan internal. Adanya pengawasan lebih yang dilakukan oleh komite audit akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bagi perusahaan, termasuk yang terkait dengan perpajakan. Sama halnya dengan keberadaan komisaris independen, manajemen akan berusaha untuk tidak melakukan atau menurunkan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Karakteristik *corporate governance* yang terakhir yaitu kualitas audit. Kualitas audit suatu perusahaan akan berpengaruh pada tindakan pajak agresif yang dilakukan manajemen. Kualitas audit suatu perusahaan didasarkan pada Kantor Akuntan Publik, yang melakukan audit terhadap laporan dan internal perusahaan. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik *big four* akan menampilkan keseluruhan perusahaan

yang riil (Panggabean, 2011, dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Kualitas audit yang lebih berkualitas, tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan semakin menurun.

Di samping *corporate governance*, kepemilikan keluarga juga menjadi salah satu hal yang memengaruhi dalam keputusan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Sari dan Martani (2010) mengungkapkan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung bertindak lebih agresif dalam masalah perpajakan. Perusahaan yang dimiliki keluarga cenderung berusaha untuk meningkatkan profitabilitas di dalam perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemilik non-keluarga. Selain itu, kepemilikan keluarga di dalam perusahaan tidak menimbulkan konflik agensi yang besar dibandingkan dengan perusahaan dengan pemilik non-keluarga. Dengan minimnya konflik yang timbul, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga akan lebih leluasa dalam mengambil keputusan terkait masalah pajak.

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan agresif pajak sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Sari dan Martani (2010) yang melakukan penelitian di Indonesia, menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chen dan Cheng dkk., 2010) bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Steijvers dan Niskanen (2011) yang melakukan replikasi

penelitian Chen dkk. (2010) juga menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan keluarga tidak menghasilkan pengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji pengaruh masing-masing karakteristik *corporate governance* dan kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif. Karakteristik-karakteristik *corporate governance* yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 hingga 2012. Pemilihan sampel perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur memberikan kontribusi pajak yang paling besar di Indonesia.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?

5. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris dari kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif.
2. Untuk memperoleh bukti empiris dari kepemilikan institusional terhadap tindakan pajak agresif.
3. Untuk memperoleh bukti empiris dari komisaris independen terhadap tindakan pajak agresif.
4. Untuk memperoleh bukti empiris dari komite audit terhadap tindakan pajak agresif.
5. Untuk memperoleh bukti empiris dari kualitas audit terhadap tindakan pajak agresif.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini merupakan implementasi langsung dari ilmu perkuliahan dan menambah wawasan mengenai isu dalam bidang perpajakan terutama mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* dan kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan informasi kepada manajemen agar lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama mengenai perpajakan perusahaan dalam hal pengurangan beban pajak yang terutang.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi: desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran tiap variabel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bab ini dibahas mengenai simpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian, keterbatasan, dan saran yang dapat diberikan bagi penelitian selanjutnya.